

## MEMAHAMI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN FRAMING SEBAGAI PRAKSIS PERUBAHAN SOSIAL

Achmad Hamudi Assegaf<sup>1\*</sup>, Faizin<sup>2</sup>, Tjondroargo Tandio<sup>3</sup>

Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

\*achmadassegaf@apps.ipb.ac.id

Submitted: 29-12-2021, Revision: 29-05-2022, Accepted: 30-06-2022

### Abstract

*Human civilization, especially with its exploitative and unsustainable development activities of the last two centuries, has made environmental issues and climate change an unavoidable discussion for the public. Various ecological issues and crises are increasingly threatening the world, including Indonesia. Along with the development of information technology, the internet, and digital media, discourses related to environmental issues are becoming increasingly prominent. However, environmental communication, especially framing, is often misunderstood as a mere transmission of information, persuasion, or manipulation. The term 'slacktivism' also emerged to address the new trend of lazy activism that relies only on clicks and social media performances. This literature study which uses exploratory qualitative analysis method aims to comprehend how environmental communication and framing can be applied as praxis to address political-ecological issues. Researchers found that strategic and effective environmental communication is an integral process that is not only able to increase public awareness and understanding but also moves the community to engage more and actively participate in bringing about real and sustainable social change. The use of social media also plays a role in gaining attention, support, and a large-scale and massive network of social-environmental activism.*

**Keywords:** *environmental communication; social media; slacktivism; framing; praxis*

### Abstrak

Peradaban manusia, khususnya dengan aktivitas pembangunan dalam dua abad terakhir yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan, telah menjadikan isu lingkungan dan perubahan iklim kini sebagai pembahasan yang tidak bisa lagi dihindari. Berbagai isu dan krisis lingkungan semakin mengancam dunia, termasuk Indonesia. Seiring perkembangan teknologi informasi, internet, dan media digital, diskursus terkait isu lingkungan menjadi semakin mengemuka. Namun, komunikasi lingkungan, khususnya *framing*, seringkali disalahartikan semata sebagai transmisi informasi, persuasi, maupun manipulasi. Bahkan, muncul istilah '*slacktivism*' untuk aktivisme malas yang hanya bermodalkan klik dan performa di media sosial tanpa benar-benar melakukan aksi yang berdampak. Kajian literatur yang menggunakan metode analisis kualitatif eksploratoris ini bertujuan untuk memahami bagaimana komunikasi lingkungan dan *framing* mampu diterapkan sebagai praksis dalam menyikapi isu-isu politis-ekologis. Peneliti mendapati bahwa komunikasi lingkungan yang strategis dan efektif merupakan proses utuh yang tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran khalayak tentang isu lingkungan, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan perubahan sosial yang konkret dan berkelanjutan. Penggunaan media sosial turut berperan dalam menggalang perhatian, dukungan, hingga jaringan aktivisme sosial-lingkungan berskala besar dan masif.

**Kata Kunci:** komunikasi lingkungan; media sosial; slacktivism; framing; praksis

### PENDAHULUAN

Keberlangsungan hidup manusia yang mencakup kesehatan, kesejahteraan, keamanan, hingga kebahagiaan pada dasarnya senantiasa bergantung pada

ekosistem dan sumber daya alam. Namun, ketergantungan yang kuat membuat manusia secara terus-menerus mengonsumsi dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak



berkelanjutan, serta mencemari dan merusak ekosistem lingkungan atas nama pembangunan dan peradaban (UNEP 2021). Sebagian dari sekian banyak isu lingkungan yang merupakan imbas dari peradaban dan aktivitas pembangunan yang dilakukan umat manusia, khususnya sejak dua abad terakhir yaitu pencemaran air dan udara, deforestasi, lenyapnya keragaman hayati, perubahan iklim, peningkatan frekuensi cuaca ekstrim, kekeringan, kenaikan air laut, hingga ancaman radioaktif dan zat-zat berbahaya lainnya (Harris 2017).

Salah satu contoh isu atau krisis lingkungan yang terkait dengan pembangunan dan aktivitas manusia adalah deforestasi. Berdasarkan data Global Forest Watch dan University of Maryland dalam Weisse dan Goldman (2021), tercatat pada 2020 hutan-hutan tropis dunia kehilangan tutupan pohon seluas 12.2 juta hektare. Sementara itu, 4.2 juta hektare dari area tersebut merupakan hutan tropis primer yang krusial bagi keragaman hayati dan penyimpanan karbon. Indonesia berada di peringkat keempat dengan tingkat deforestasi hutan primer mencapai 270.057 hektare, berada di atas Peru (190.199 hektare), dan di bawah Bolivia (275.883 hektare), Kongo (490.613 hektare), dan Brazil (1.704.090 hektare). Imbas atas hilangnya hutan primer tersebut, menurut Weisse dan Goldman (2021), adalah terlepasnya 2.64 gigaton emisi karbon atau setara dua kali lipat emisi dari keseluruhan mobil di jalanan Amerika Serikat dalam setahun.

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2021), pada 3 Maret 2021 menyatakan bahwa Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi hingga 75.03% pada periode tahun 2019-2020, sehingga tercatat hanya seluas 115.46 ribu hektare (jauh dari angka laporan Global Forest Watch). Angka tersebut juga diklaim jauh lebih kecil dibandingkan pada periode 2018-2019 yang mencapai 462.46 ribu

hektare. Pernyataan dengan nada yang sama disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di KTT COP 26 pada 1 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. Joko Widodo (2021) mengklaim bahwa laju deforestasi di Indonesia turun secara signifikan, hingga mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir, begitu juga dengan tingkat kebakaran hutan yang turun hingga 22 persen di tahun 2020. Presiden menekankan bahwa pemerintahannya terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini langsung dibantah oleh Greenpeace Indonesia (2021), yang menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia justru mengalami peningkatan signifikan, dari yang sebelumnya 2.45 juta hektare pada kurun 2003-2011 naik menjadi 4.8 juta hektare pada kurun 2011-2021. Greenpeace menyoroti bahwa data yang ditampilkan pemerintah hanyalah sepele, karena hanya berkisar di tahun 2019-2021, di mana aktivitas pembukaan lahan memang melambat karena situasi pandemi, bukan karena upaya pemerintah. Greenpeace Indonesia, sebaliknya, menyatakan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani perubahan iklim.

Isu deforestasi di Indonesia yang dibahas di atas menunjukkan bahwa bidang komunikasi lingkungan menjadi penting dan relevan dalam kaitannya dengan pembangunan, baik di Indonesia maupun global. Sebab, sebagaimana menurut Herutomo dan Istiyanto (2021), bahwa untuk menjaga kelestarian hutan secara kolaboratif, dibutuhkan komunikasi lingkungan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Komunikasi lingkungan menurut Pezzullo dan Cox (2018) merupakan moda ekspresi konstitutif dan pragmatis, yang artinya melibatkan proses penamaan, pemaknaan, orientasi, dan negosiasi hubungan ekologis manusia di "dalam" dunia dan "dengan" dunia, sehingga meliputi hubungan dengan sistem, elemen,

dan spesies nonmanusia. Berdasarkan definisi tersebut, maka setidaknya ada dua fungsi yang dimiliki komunikasi lingkungan (Pezzullo dan Cox 2018): Pertama, fungsi konstitutif: meliputi moda interaksi verbal dan nonverbal yang membentuk, mengarahkan, dan menegosiasikan makna, nilai, dan hubungan. Melalui fungsi ini, komunikasi lingkungan berperan dalam menciptakan definisi, perspektif, perasaan, hingga keyakinan tentang suatu isu. Melalui komunikasi konstitutif, aktor bisa menentukan mana yang dianggap masalah lingkungan, dan mana yang bukan. Isu perbedaan data, metode, dan interpretasi mengenai kasus deforestasi di Indonesia tersebut di atas bisa menjadi contoh bagaimana masing-masing aktor punya pemaknaan dan definisi yang berbeda dan perlu dinegosiasikan. Kedua, fungsi pragmatis: meliputi moda interaksi verbal dan nonverbal yang menyatakan tujuan instrumental seperti berjanji, menuntut, mendidik, memperingatkan, menolak, mempromosikan, dll. yang intinya ditujukan untuk menciptakan aksi konkret. Melakukan pendidikan dan kampanye lingkungan, demonstrasi, hingga menyatakan dukungan terhadap seorang politisi untuk isu lingkungan termasuk dalam fungsi pragmatis komunikasi lingkungan. Fungsi komunikasi lingkungan adalah untuk mendefinisikan dan menentukan masalah atau isu lingkungan yang sebenarnya tengah dihadapi melalui interaksi verbal dan nonverbal, sekaligus menentukan aksi apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan (Pezzullo dan Cox 2018).

Dalam kaitannya dengan kasus di atas, konsep *framing* dan gerakan sosial dengan pendekatan komunikasi perubahan sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, serta menggalang aksi dan partisipasi publik melalui penelitian maupun pertukaran pesan atau dialog.

Perkembangan internet, media digital, dan khususnya media sosial, menjadikan konsep *framing* tidak hanya bisa digunakan oleh institusi atau organisasi, tetapi juga setiap individu yang hendak merancang, membingkai, dan menyebarkan pesan-pesannya sendiri untuk tujuan-tujuan perubahan sosial. Castells (2015) mengungkapkan bahwa kemunculan internet dan media digital bisa mewujudkan jejaring masyarakat yang berguna untuk berbagi kegelisahan, keprihatinan, kemarahan, hingga harapan yang bisa berujung pada suatu gerakan sosial.

Namun, di saat yang sama, fenomena problematis diungkapkan Cabrera *et al.* (2017), tentang maraknya tren "*slacktivism*" atau aktivisme malas di era media digital, khususnya di kalangan muda. *Slacktivism* dapat diartikan sebagai aksi-aksi kepedulian atau ekspresi politis yang hanya dilakukan di dunia maya yang tidak efektif dan tidak berupaya menantang relasi kuasa ataupun mengatasi penyebab terjadinya masalah-masalah sosial-lingkungan. Aktivisme semu ini biasanya berupa *clicktivism*, yaitu ekspresi simpati dan politik, ataupun sumbangan baik secara langsung ataupun dengan menyumbangkan klik, seperti untuk menyukai unggahan atau membeli produk sumbangan. Permasalahan ini menjadikan komunikasi, khususnya komunikasi lingkungan, seringkali disalahartikan sebagai praktik transmisi dan diseminasi pesan-pesan lingkungan yang tidak mampu menimbulkan perubahan atau dampak yang nyata.

Tidak bisa dipungkiri, kampanye *online* melalui internet dan media sosial merupakan fenomena meskipun baru, tetapi telah marak digunakan oleh organisasi nonprofit dan kelompok-kelompok advokasi (Chou *et al.* 2020). Meskipun punya keunggulan dalam menjangkau khalayak yang lebih luas, jenis kampanye ini cukup kontroversial karena dianggap lemah atau tidak efektif dalam menciptakan perilaku yang penuh komitmen. Kendati

demikian, bukan tidak mungkin bahwa aktivitas atau kampanye virtual bisa ditransformasi menjadi suatu komitmen perilaku, bahkan tindakan nyata (Chou *et al.* 2020).

Melihat berbagai tantangan, dilema, hingga kesalahpahaman tentang komunikasi lingkungan seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejumlah pemaknaan dan praktik komunikasi lingkungan, khususnya *framing*, sebagai praksis sosial di era digital. Melalui kajian ini, penulis hendak memahami bagaimana komunikasi lingkungan digunakan tidak hanya untuk penyadaran kritis, tetapi juga untuk menciptakan aksi kolektif.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan studi literatur atau *desk research* terhadap literatur dan penelitian terdahulu menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Sebagaimana menurut Aspers dan Corte (2019), penelitian kualitatif merupakan proses berulang-ulang dalam upaya memahami fenomena atau objek yang dikaji secara lebih dekat sehingga bisa memberikan pemahaman baru atau meningkatkan pemahaman komunitas akademik tentang fenomena tersebut. Adapun paradigma konstruktivis atau yang juga sering disebut dengan interpretivisme, menurut Creswell dan Poth (2018), merupakan suatu pendekatan yang mengakui adanya keberagaman dalam pandangan dunia karena meyakini bahwa setiap individu mengembangkan pandangan dan pemaknaan subjektif atas pengalaman, peristiwa, atau objek. Sehingga dalam penelitian, pendekatan konstruktivis mengarahkan peneliti untuk mengkaji kompleksitas pandangan-pandangan tersebut ketimbang berusaha mempersempitnya menjadi kategori-kategori atau gagasan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri sejumlah literatur, mulai dari buku, artikel penelitian, artikel tinjauan, hingga sumber-sumber dari media daring terkait isu lingkungan, komunikasi lingkungan, serta penggunaan *framing* melalui media sosial dalam gerakan lingkungan. Dari berbagai sumber tersebut, artikel ini mencari beragam pandangan terkait praktik komunikasi lingkungan di era media digital dari beragam perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perkembangan praksis komunikasi lingkungan di era internet dan media digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi berperan krusial dalam upaya perlindungan maupun penyelamatan lingkungan, karena pesan-pesan dan penamaan tidak hanya mengarahkan cara pandang, tetapi juga menentukan tindakan, perlakuan, hingga relasi antara manusia dengan lingkungan alam (Pezzullo dan Cox 2018). Teori *framing* hadir dari hubungan antara media dengan dorongan sosial-budaya terkait yang kemudian membentuk pemahaman, opini, dan keyakinan masyarakat atau publik untuk melakukan suatu aksi. Ranah media dan politik yang semakin terfragmentasi menjadikan *framing* semakin penting dalam upaya menanggulangi krisis ekologis melalui edukasi hingga aksi kolektif (Polk 2020). Upaya penanggulangan isu lingkungan selalu memerlukan *frame* atau bingkai yang efektif, karena selain berguna untuk membentuk pemahaman yang jelas dan jernih di tengah masifnya berita, pesan-pesan, dan perdebatan di media yang membingungkan, juga untuk menentukan siapa saja pihak atau aktor yang bersalah dan mesti dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya krisis lingkungan (Polk 2020). Framing semestinya diartikan sebagai proses utuh yang mencakup fungsi konstitutif seperti identifikasi, definisi, dan negosiasi makna, masalah, dan solusi,

hingga fungsi pragmatis dan strategis seperti perencanaan dan penggalangan aksi kolektif, hingga litigasi.

### **Komunikasi Sebagai Proses Dialogis**

Komunikasi lingkungan bukanlah proses penyampaian pesan satu arah, melainkan dua arah yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Seiring pergeseran paradigma komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, komunikasi lingkungan dan iklim bukan lagi diartikan sekadar sebagai transmisi informasi yang sentralistik melalui media untuk mengubah perilaku, persuasi, apalagi manipulasi, melainkan proses interaksi yang partisipatoris dan dialogis yang ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau publik (*public engagement*) (Polk, 2020).

Komunikasi lingkungan bisa diejawantahkan dalam bentuk ekopedagogik (*ecopedagogy*) sebagaimana diajukan Misiaszek (2020) yang merujuk pada perspektif Paulo Freire (1921-1997) tentang pendidikan untuk perubahan sosial melalui proses komunikasi dialogis. Ekopedagogik yang dimaksud merupakan komunikasi dialogis antarsubjek yang dilakukan untuk mengonstruksi dan mewujudkan utopia sosial-lingkungan (*socio-environmental utopia*), serta mengidentifikasi hambatan dan masalah sosial-lingkungan apa saja yang sedang atau akan dihadapi. Pendekatan komunikasi Freire mendorong masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam perubahan sosial, dimulai dengan stimulasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi sosial-lingkungan seperti "siapa yang diuntungkan? siapa yang dirugikan? dan siapa yang harus bertindak?", "mengapa perubahan harus bertindak dan melakukan perubahan?", hingga "bagaimana cara mewujudkan perubahan?" (Fernández-Aballí Altamirano 2020; Misiaszek 2020). Selanjutnya, cita-cita yang terkonstruksi serta masalah yang

diidentifikasi bersama melalui dialog tersebut merupakan konsensus yang kemudian diarahkan untuk menggalang aksi kolektif diiring refleksi kritis yang mampu mentransformasi kondisi sosial-lingkungan menjadi lebih baik. Proses yang utuh dan berkesinambungan antara aksi dengan refleksi kritis untuk menciptakan perubahan sosial (dan lingkungan) inilah yang dimaksud Freire sebagai praksis (*praxis*) (Misiaszek 2020).

Jika dilihat melalui perspektif ekopedagogik, komunikasi lingkungan mensyaratkan adanya dialog horizontal dan partisipatoris antarsubjek, agar semua pemangku kepentingan bisa saling bertukar pemahaman tentang masalah sosial-lingkungan berdasarkan apa yang dialami dan dihadapi secara nyata, sehingga kesadaran, cita-cita, tujuan, dan solusi yang tercipta menjadi lebih relevan dan mudah untuk dipahami maupun ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pelaku komunikasi tidak bisa lagi hanya membenarkan pengetahuan dan perspektifnya sendiri dan harus mempertimbangkan dan bernegosiasi dengan berbagai unsur dan pihak lain dengan kepentingan, keyakinan, nilai, dan pandangan dunia yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan Hurst & Stern, (2020) yang mengkaji tentang komunikasi perubahan iklim untuk khalayak dengan pandangan politik yang berlawanan (progresif dan konservatif), mendapati bahwa untuk melakukan *framing* yang efektif sehingga mudah dipahami dan diterima oleh suatu pihak agar mau melakukan aksi, pesan yang dirancang harus mengandung pesan moral sesuai dengan yang diyakini oleh kelompok tersebut. Misalnya, untuk bisa mengajak orang-orang konservatif ikut peduli dengan isu perubahan iklim, maka pesan dan framing yang dibuat harus bisa memuat perspektif moral konservatif dan menyajikannya dalam pesan dan penyampai pesan (*messenger*) yang sesuai (Hurst & Stern, 2020). Hal ini menunjukkan

bahwa komunikasi lingkungan, khususnya *framing* bukan lagi merupakan persuasi ataupun manipulasi yang bersifat *top-down*, karena pada dasarnya setiap pesan yang dirancang perlu melewati proses definisi, diskusi, negosiasi, dan penyesuaian yang berbasis pada nilai, moralitas, keyakinan, dan perspektif khalayak atau publik.

### **Komunikasi Sebagai Aksi**

Kesalahpahaman lain tentang komunikasi lingkungan di antaranya yaitu anggapan bahwa proses komunikasi berhenti hanya sampai pada penyampaian pesan dan informasi, yang pada akhirnya berujung pada perubahan perilaku. Padahal, tujuan komunikasi lingkungan adalah untuk menciptakan aksi kolektif untuk mengubah "dunia" atau realitas. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Ardhian et al. (2016) yang menggunakan kerangka teori Gerakan Sosial Baru (GSB) yang juga menggunakan konsep *framing* untuk mengkaji peran dan strategi organisasi non pemerintah dalam arena politik lingkungan hidup serta bagaimana organisasi tersebut membentuk wacana, ide, dan gerakan untuk meyakinkan kelompok sasaran. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan peran dan strategi organisasi non pemerintah pada tingkatan nasional maupun lokal dalam upaya menanggapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Pada tingkatan nasional, penelitian dilakukan di Jakarta dan Bogor, sementara pada tingkatan lokal, penelitian dilakukan di Jambi.

Hasil penelitian Ardhian et al. (2016) mengungkap bahwa organisasi pemerintah mampu memanfaatkan keluhan kolektif untuk membangun struktur mobilisasi, *framing*, dan bentuk-bentuk aksi. Dengan cara berkomunikasi dan memengaruhi para pemangku kebijakan kunci secara langsung, menggunakan jaringan advokasi internasional untuk meningkatkan tekanan politik terhadap

pemerintah, hingga memobilisasi dukungan elit dan mempromosikan solusi-solusi tandingan.

### **Pemanfaatan Media Sosial**

Komunikasi lingkungan yang efektif, khususnya di media digital merupakan penggerak, dan bukan substitusi bagi aksi. Fenomena *slacktivism*, *clicktivism*, dan sejenisnya merupakan gambaran tentang bagaimana simbol-simbol dalam pesan-pesan di media digital telah gagal dimaknai sebagai pengungkapan tentang krisis yang sebenarnya, sehingga bukannya meningkatkan rasa urgensi dan dorongan untuk berpartisipasi, malah menimbulkan perasaan tenang dan puas hanya lewat klik untuk menyukai unggahan, berbagi utasan, ataupun memberikan sedikit sumbangan secara daring. Namun, fenomena ini tidak semestinya dibesar-besarkan dan digeneralisasi seakan-akan mewakili semua komunikasi dan kampanye sosial-lingkungan daring yang terjadi. Sebab, tidak sedikit gerakan sosial yang berhasil memanfaatkan internet dan media digital sebagai katalisator pergerakannya.

Hasil riset Anam et al. (2020) yang meneliti efektivitas media sosial dalam gerakan sosial penolakan masyarakat terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam gerakan sosial-lingkungan. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini melakukan *social network analysis* (SNA) mengenai percakapan, tren, dan distribusi isu di Twitter. Hasilnya kemudian mengungkap bahwa meskipun cenderung menurun, tren percakapan terkait isu reklamasi di media sosial dalam kurun 2017-2019 tidak pernah sepi. Percakapan yang dipengaruhi oleh aktivitas dan framing dari organisasi aktivis lingkungan dan para nelayan tersebut diketahui berpengaruh dalam proses framing isu reklamasi, sehingga mendorong terjadinya gerakan sosial-lingkungan yang

semakin masif di tingkat akar rumput. Penelitian Anam et al., (2020) menunjukkan bahwa dengan strategi komunikasi lingkungan dan *framing* yang tepat, percakapan di media sosial bisa ditransformasi melebihi sekadar diskusi, perdebatan, dan transmisi informasi, tetapi juga menjadi media yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong gerakan sosial-lingkungan akar rumput yang masif.

Pandangan sinis dan pesimistis terhadap kampanye dan aktivisme melalui media sosial yang banyak beredar selama ini, menurut Jones (2015), telah gagal dalam menangkap relasi antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik. Sebab, menurutnya, media sosial terbukti berdampak dalam bagi aktivitas politik dan sipil masyarakat, mulai dari konsumsi berita dan informasi, keterlibatan dalam diskursus sosial-politik, hingga pembentukan komunitas. Penelitian Kwak et al. (2018) bahkan mengungkap bahwa dengan kemunculan media digital, bentuk partisipasi politik "tradisional" seperti ikut serta dalam pemilihan atau aksi demonstrasi turut mengalami penurunan, sementara masa depannya bergantung pada persepsi positif terhadap bentuk partisipasi politik baru, yaitu partisipasi melalui teknologi dan media digital. Sehingga, menurut Kwak et al. (2018), setidaknya dengan meningkatkan partisipasi politik melalui media digital sebagai bentuk partisipasi politik ambang batas rendah dan persepsi positif atasnya, publik akan lebih dekat menuju keterlibatan politik (*engagement*) yang lebih konkret.

### **Komunikasi Untuk Jaringan Gerakan**

Melalui partisipasi, komunikasi lingkungan tidak hanya bisa membangun dan memperkuat suatu gerakan, tetapi juga memperluas jaringan dan menggalang kolaborasi dengan kelompok, gerakan, lembaga, dan berbagai pihak lain dengan nilai dan kepentingan yang sama. Harris

(2017; 74) menilai bahwa jaringan komunikasi baik vertikal maupun horizontal diperlukan untuk menyebarkan pesan-pesan baik solidaritas maupun perlawanan. Komunikasi vertikal berfungsi untuk diseminasi informasi mengenai masalah-masalah lingkungan yang terjadi dan untuk mengorganisasi aksi strategis, sementara komunikasi horizontal berfungsi untuk melestarikan dialog, pertukaran opini, bahkan perdebatan antarpartisipan untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.

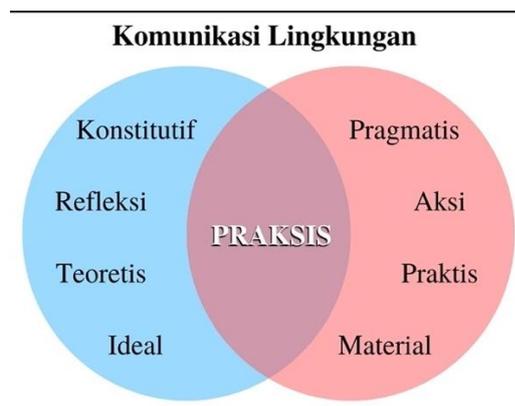
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan persebaran informasi dan dialog tentang lingkungan ini semakin mudah dilakukan. Begitu pun aktivisme lingkungan di ruang-ruang siber seperti media sosial yang juga semakin marak. Setiap orang bisa mengedukasi dirinya sendiri, bertukar pendapat, berdebat, hingga membentuk jaringan advokasi tanpa harus benar-benar bertemu tatap muka. Saat ada kebijakan atau aktivitas pembangunan yang dirasa berdampak buruk bagi lingkungan, setiap orang bisa menyuarakan protes sekaligus mengajak warganet lain untuk ikut menyuarakan penolakan, mempopulerkan tagar, menandatangani petisi, yang pada intinya bisa mengangkat isu-isu lingkungan ke permukaan. Selanjutnya, jaringan komunikasi siber tersebut bisa ditindaklanjuti dan dikembangkan menjadi gerakan sosial-lingkungan nyata.

Jaringan aksi protes penolakan reklamasi Teluk Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, pembangunan pabrik semen di Kendeng, pembangunan tambang emas di Sangihe, dll. merupakan contoh bagaimana suatu isu meskipun terjadi di satu wilayah kecil, tetapi bisa menjadi perhatian publik dalam skala luas, baik nasional hingga global berkat jaringan aktivisme di ruang siber. Selain membuka jalan bagi aktivisme masyarakat akar rumput, komunikasi lingkungan juga bisa menjadi jalan bagi semua pihak dan pemangku kepentingan,

mulai dari masyarakat dengan pandangan politik berbeda, organisasi nonprofit, sektor swasta atau korporasi, hingga pemerintah, untuk secara partisipatif mengidentifikasi masalah, mendefinisikannya, bernegosiasi, mencari solusi, hingga berkolaborasi dalam aksi.

### Pembahasan

Pembahasan dan tinjauan dalam kajian ini setidaknya telah menegaskan bahwa komunikasi lingkungan, sebagaimana menurut Pezzullo dan Cox (2018), lebih dari sekadar "berbicara tentang lingkungan" dengan menyoroti kekuatan ekspresi, kata-kata, simbol, dan wacana dalam menciptakan perubahan sosial dan mentransformasi realitas. Komunikasi mesti ditempatkan sebagai praksis, yaitu suatu pendekatan yang mampu (atau bahkan harus) mengakomodasi dua dimensi dalam satu kontinum sekaligus: refleksi-aksi, konstitutif-pragmatis, ideal-material, teoretis-praktis, sehingga isu-isu lingkungan bisa dihadapi dan ditanggulangi secara lebih komprehensif dan responsif.



Gambar 1. Elemen praksis dalam komunikasi lingkungan (Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022)

Pada dimensi konstitutif, refleksi, teoretis, dan ideal, komunikasi lingkungan dapat ditemui pada ragam upaya dan proses konstruksi wacana dan pertukaran pesan baik dalam skala interpersonal, kelompok,

publik, hingga massa yang bukan hanya ditujukan untuk "mengantarkan" pesan, melainkan untuk mencari kebenaran, menumbuhkan kesadaran, hingga mencapai konsensus terkait isu-isu lingkungan yang ada dengan tujuan untuk melakukan perubahan sosial-lingkungan. Tahapan selanjutnya ialah bersifat lebih pragmatis, aktif, teoretis, dan material, yaitu saat segala pemahaman, kesadaran, dan konsensus terkait lingkungan itu diejawantahkan menjadi tindakan-tindakan kolektif instrumental seperti membentuk jaringan dan menggalang gerakan sosial untuk konservasi, preservasi, rehabilitasi, hingga advokasi lingkungan.

Oleh karena itu, tujuan akhir dalam komunikasi lingkungan yang holistik dan multidimensional bukan hanya untuk menjadikan individu-individu atau massa menjadi lebih paham, sadar, ataupun berperilaku "ramah lingkungan", melainkan untuk menciptakan perubahan sosial yang mampu mengantarkan suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat beralih dari ketidaktahuan menuju kesadaran mengenai relasi manusia-alam dan isu-isu lingkungan yang ada, kemudian melalui kesadaran tersebut mampu berpikir dan berdiskusi kritis untuk mencari solusi atas permasalahan sosial-lingkungan yang dihadapi bersama, hingga pada akhirnya berkolaborasi menerapkan solusi-solusi tersebut melalui gerakan sosial yang berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh serta membangun relasi manusia-alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

### SIMPULAN

Memahami komunikasi lingkungan sebagai praksis berarti mengakhiri dikotomi antara aksi dan refleksi. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori-teori dan hasil-hasil penelitian di atas, komunikasi lingkungan bukan hanya tentang merangkai kata-kata dan menyampaikan pesan tentang lingkungan

secara tertata, melainkan suatu proses utuh dan holistik dimulai dari penamaan, pemaknaan, kesadaran kritis, negosiasi makna, hingga mewujudkan tindakan, menggalang gerakan, jaringan, dan kolaborasi yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan perbaikan, keberlanjutan, dan harmoni antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan partisipatoris menjadikan komunikasi lingkungan dan *framing* sebagai proses dialogis yang mampu menjadi strategi perubahan sosial berbasis pada keterlibatan publik (*public engagement*) sejak identifikasi masalah, pencarian solusi, hingga aktualisasi dalam bentuk gerakan akar rumput hingga kebijakan. Melalui komunikasi lingkungan yang strategis dan efektif, perkembangan teknologi dan maraknya aktivisme di ranah siber dan media sosial tidak akan berhenti sampai pada wacana dan diskusi, apalagi aktivisme semu (*slacktivism*), tetapi bisa bertransformasi menjadi aksi dan gerakan sosial-lingkungan yang nyata, menjangkau lebih banyak pihak secara luas dan masif, untuk memberikan dampak baik bagi masyarakat dan lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam K, Kolopaking LM, Kinseng RA. 2020. The Effectiveness of Social Media Usage within Social Movement to Reject the Reclamation of the Jakarta Bay, Indonesia. *Sodality J Sociol Pedesaan*. 8(1):64–81. doi:10.22500/8202028955.
- Ardhian D, Adiwibowo S, Wahyuni ES. 2016. PERAN DAN STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM ARENA POLITIK LINGKUNGAN HIDUP [Cited By (since 2016): 1]. *Sodality J Sociol Pedesaan*. 4(3). doi:10.22500/sodality.v4i3.14429.
- Aspers P, Corte U. 2019. What is Qualitative in Qualitative Research [Cited By (since 2019): 66]. *Qual Sociol*. 42(2):139–160. doi:10.1007/s11133-019-9413-7.
- Cabrera NL, Matias CE, Montoya R. 2017. Activism or Slacktivism? The Potential Pitfalls of Social Media in Contemporary Student Activism. *J Divers High Educ*. 10(4):400–415. doi:10.1037/dhe0000061.
- Castells M. 2015. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in The Internet Age*. 2nd Editio. Cambridge: Polity Press.
- Chou EY, Hsu DY, Herson E. 2020. From slacktivism to activism: Improving the commitment power of e-pledges for prosocial causes [Cited By (since 2020): 3]. *PLoS One*. 15(4). doi:10.1371/journal.pone.0231314.
- Creswell JW, Poth CN. 2018. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th Ed. Los Angeles, CA: SAGE Publications, Inc.
- Fernández-Aballí Altamirano A. 2020. The Importance of Paulo Freire to Communication for Development and Social Change. Di dalam: Servaes J, editor. *Handbook of Communication for Development and Social Change*. Singapore: Springer Nature Singapore. hlm 309–326.
- Greenpeace Indonesia. 2021 Nov 2. Siaran Pers: Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 di Glasgow. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45514/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-isi-pidato-presiden-joko-widodo-di-konferensi-cop-26-glasgow/>.
- Harris US. 2017. Engaging Communities in Environmental Communication. *Pacific Journal Rev*. 23(1):65–79. doi:10.24135/pjr.v23i1.211.
- Herutomo C, Istiyanto SB. 2021. KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM MENGEMBANGKAN

- KELESTARIAN HUTAN. WACANA *J Ilm Ilmu Komun.* 20(1). doi:10.32509/wacana.v20i1.1165.
- Hurst K, Stern MJ. 2020. Messaging for environmental action: The role of moral framing and message source [Cited By (since 2020): 13]. *J Environ Psychol.* 68:101394. doi:10.1016/j.jenvp.2020.101394.
- Jones C. 2015. Slacktivism and the social benefits of social video: Sharing a video to ‘help’ a cause. *First Monday.*, siap terbit.
- Kementerian LHK RI. 2021 Mar 4. Siaran Pers: Laju Deforestasi Indonesia Turun 75, 03%. *Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI.*, siap terbit. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03).
- Kwak N, Lane DS, Weeks BE, Kim DH, Lee SS, Bachleda S. 2018. Perceptions of Social Media for Politics: Testing the Slacktivism Hypothesis [Cited By (since 2018): 15]. *Hum Commun Res.* 44(2):197–221. doi:10.1093/hcr/hqx008.
- Misiaszek GW. 2020. Ecopedagogy: teaching critical literacies of ‘development’, ‘sustainability’, and ‘sustainable development.’ *Teach High Educ.* 25(5):615–632. doi:10.1080/13562517.2019.1586668.
- Pezzullo PC, Cox R. 2018. *Environmental Communication and the Public Sphere.* 5th Ed. Los Angeles, CA: SAGE Publications, Inc.
- Polk E. 2020. Communicating Climate Change: Where Did We Go Wrong, How Can We Do Better? Di dalam: Servaes J, editor. *Handbook of Communication for Development and Social Change.* Singapore: Springer. hlm 795–813.
- Presiden RI Joko Widodo. 2021 Nov 2. Pidato Presiden Republik Indonesia di KTT COP 26, 2 November 2021. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-di-ktt-cop-26/>.
- UNEP. 2021. Making Peace With Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies. Geneva. <https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf>.
- Weisse M, Goldman E. 2021. Primary Rainforest Destruction Increased 12% from 2019 to 2020. <https://research.wri.org/gfr/forest-pulse>.